

Peran Manajerial Kepala Sekolah dan Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di SDN Gunung Picung 07 Pamijahan Bogor

Esa Hari Wibowo¹, Yusi Srihartini², Ika Kartika³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

*jupanipb@gmail.com*¹, *yusisrihartini5@gmail.com*², *ikakartika3065@gmail.com*³

ABSTRACT

This research examines the managerial role of the school principal and community participation in the implementation of the Independent Curriculum at SDN Gunung Picung 07 Pamijahan, Bogor. This research aims to identify the impact of the school principal's managerial role and community involvement on the success of curriculum implementation. With a qualitative approach, data is collected through observation, interviews and documentation, and analyzed inductively using triangulation techniques to ensure validity. The research results show that the managerial role of the school principal and community participation, including parental involvement and the Foster Friends Movement (GERTA) program, play an important role in the successful implementation of the Independent Curriculum. The successful implementation of this curriculum depends on strong principal management, active community participation, as well as support and innovation in teaching methods, which overall support effective curriculum implementation and bring positive change in education.

Keywords : Managerial Role, Community Participation, Implementation of the Independent Curriculum

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran manajerial kepala sekolah dan partisipasi masyarakat dalam implementasi Kurikulum Merdeka di SDN Gunung Picung 07 Pamijahan, Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak peran manajerial kepala sekolah dan keterlibatan masyarakat terhadap keberhasilan penerapan kurikulum. Dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis secara induktif dengan teknik triangulasi untuk memastikan validitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran manajerial kepala sekolah dan partisipasi masyarakat, termasuk keterlibatan orang tua dan program Gerakan Teman Asuh (GERTA), berperan penting dalam keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka. Kesuksesan implementasi kurikulum ini bergantung pada manajemen kepala sekolah yang kuat, partisipasi aktif masyarakat, serta dukungan dan inovasi dalam metode pengajaran, yang secara keseluruhan mendukung penerapan kurikulum yang efektif dan membawa perubahan positif dalam pendidikan.

Kata kunci : Peran Manajerial, Partisipasi Masyarakat, Implementasi Kurikulum Merdeka.

PENDAHULUAN

Kewenangan satuan pendidikan dalam menyusun kurikulum bertujuan memastikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa dan kondisi lokal. Hal ini penting untuk merespons keragaman di Indonesia dan meningkatkan mutu pendidikan (Azis, R., 2018). Kurikulum Merdeka, diperkenalkan pada 2021 oleh Kemendikbudristek, memungkinkan siswa belajar secara kreatif dan fleksibel, serta mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis dan kolaborasi (Lidiawati, 2023). Meskipun informasi tentang

Kurikulum Merdeka telah disebarluaskan, beberapa sekolah masih ragu untuk menerapkannya (Kemendikbudristek, 2023). Program Sekolah Penggerak bertujuan membantu sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum ini (Mariana, D., 2021). Kualitas manajerial kepala sekolah sangat penting dalam keberhasilan implementasi kurikulum. Kepala sekolah harus memiliki kompetensi dalam perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan (Anjani, N.F. dan Febriana, D., 2021). Tantangan juga muncul di daerah dengan ekonomi rendah, di mana partisipasi masyarakat berperan penting dalam mendukung mutu pendidikan (Emor, A.C., Lonto, A.L., dan Pangalila, 2019). Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi peran manajerial kepala sekolah dan partisipasi masyarakat dalam implementasi Kurikulum Merdeka di SDN Gunung Picung 07, Pamijahan, Bogor, untuk menjadi acuan kebijakan yang sesuai dengan visi dan misi sekolah.

TINJAUAN LITERATUR

Peran Manajerial Kepala Sekolah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6 Tahun 2018, beban kerja kepala sekolah difokuskan pada manajemen, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi terhadap guru serta tenaga kependidikan, dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan sesuai delapan standar nasional. Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 162/U/2003, kepala sekolah memiliki tujuh peran utama yaitu sebagai pemimpin, manajer, pendidik, administrator, wirausahawan, pencipta iklim kerja, dan Penyelia.

Peran-peran ini memungkinkan kepala sekolah berkontribusi signifikan dalam pengembangan sekolah dan peningkatan kualitas pendidikan. Pada tahun 2007, standar kepala sekolah yang mencakup aspek manajerial ditetapkan. Aspek-aspek tersebut meliputi:

1. Penyusunan rencana sekolah/madrasah.
2. Pengembangan struktur organisasi.
3. Optimalisasi sumber daya.
4. Manajemen perubahan menuju organisasi pembelajaran yang efektif.
5. Penciptaan budaya sekolah yang kondusif dan inovatif.
6. Pengelolaan staf dan guru.
7. Manajemen sarana dan prasarana.
8. Pembangunan hubungan dengan masyarakat.
9. Manajemen peserta didik.
10. Pengelolaan kurikulum dan aktivitas pembelajaran.
11. Manajemen keuangan dengan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi.
12. Manajemen administrasi sekolah.
13. Pengelolaan unit layanan khusus.
14. Pengelolaan sistem informasi sekolah.
15. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran dan manajemen.
16. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

Kepala sekolah tidak hanya menerima suatu perubahan tetapi juga harus berpikir untuk membuat perubahan di sekolah. Kepala sekolah perlu memahami poin penting dari kebijakan merdeka belajar secara utuh, karena hal tersebut akan berkaitan dengan kebijakan yang akan diambil oleh kepala sekolah sebagai seorang pemimpin dalam mengimplementasikan kebijakan merdeka belajar di sekolah. Untuk menjalankan perannya dengan baik, Kepala sekolah perlu mengikuti serangkaian langkah, termasuk perencanaan perubahan kurikulum dengan melibatkan tim pengembangan kurikulum yang berkualifikasi. Adapun menurut Isa, Asrori, M., dan Muharini, R., (2022) peran kepemimpinan yang dilakukan kepala sekolah yaitu sebagai fasilitator dan motivator guru dalam penyediaan akses pendidikan dan pelatihan kurikulum Merdeka. Kepala sekolah sebagai supervisor secara intensif, berpartisipasi aktif dalam pembinaan kompetensi guru. Dalam aspek monitoring dan evaluasi, kepala sekolah mengadakan rapat secara rutin atau diskusi untuk mengetahui kendala dan faktor penghambat untuk selanjutnya mencari solusi dan memberikan arahan.

Menurut Rosmalah, Arisadi, dan Mujahidah (2023) untuk menjalankan perannya dengan baik, kepala sekolah perlu mengikuti serangkaian langkah, termasuk perencanaan perubahan kurikulum dengan melibatkan tim pengembangan kurikulum yang berkualifikasi. Keterlibatan guru dan tenaga kependidikan dalam proses ini sangat penting, dan kepala sekolah bertanggung jawab untuk memfasilitasi partisipasi mereka. Dengan demikian, peran kepala sekolah dalam menerapkan Kurikulum Merdeka tidak hanya sebagai administrator, tetapi juga sebagai pemimpin dan fasilitator perubahan. Dengan pemahaman yang kuat tentang kurikulum dan strategi yang tepat, kepala sekolah dapat memastikan suksesnya implementasi kurikulum yang inovatif di sekolah mereka, berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan, dan membantu siswa mencapai potensi terbaik mereka.

Peran Partisipasi Masyarakat

Makna Partisipasi masyarakat adalah proses yang menggambarkan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat membentuk dan terlibat dalam seluruh inisiatif pembangunan (Alim,W.S., dkk., 2022). Sedangkan menurut Tawai. A and Yusuf, M., (2017) partisipasi masyarakat adalah sebuah bentuk keterlibatan mental/pikiran dan emosi atau perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut tanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Hal ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dijelaskan bahwa pemberdayaan dan peran serta masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, serta meningkatkan peran serta masyarakat, termasuk dalam meningkatkan sumber dana dan penyelenggaraan pendidikan. Peran serta masyarakat dalam pendidikan dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, ataupun lembaga seperti yayasan, organisasi masyarakat atau pihak swasta lainnya. Menurut Kariadi (2020) secara eksplisit dikemukakan bahwa tujuan partisipasi sekolah dengan masyarakat adalah:

- a. Memelihara, menumbuhkan, menjaga dan meningkatkan serta mengembangkan pendidikan
- b. Saling memberikan atau sharing informasi antara sekolah dengan orang tua murid demi kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan atau keberhasilan siswa di sekolah.
- c. Dari kegiatan tersebut masyarakat mempunyai rasa memiliki (senses of belonging) terhadap keberadaan suatu lembaga pendidikan.

Peran masyarakat yang diamanahkan dalam Undang-Undang dapat diartikan sebagai suatu kesadaran penuh dari pemerintah bahwa mitra terbaik dalam melaksanakan pendidikan adalah masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pendidikan berkaitan dengan pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan penilaian (Baharuddin, 2018). Berdasarkan beberapa teori diatas, tujuan partisipasi masyarakat adalah memelihara serta memajukan pendidikan di sekolah, memberikan timbal balik antara sekolah dengan masyarakat demi kemajuan dan keberhasilan pendidikan serta menjadikan masyarakat agar merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pendidikan dan pembelajaran di madrasah/sekolah.

Implementasi Kurikulum Merdeka

Implementasi perubahan kebijakan pendidikan, termasuk kurikulum, merupakan sebuah proses panjang yang membutuhkan pembelajaran yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah memberikan kesempatan kepada pendidik dan satuan pendidikan untuk mengadopsi Kurikulum Merdeka sesuai dengan tingkat kesiapan mereka masing-masing. Seperti halnya peserta didik belajar sesuai dengan tingkat kesiapan mereka, pendidik dan satuan pendidikan juga perlu belajar untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka sesuai dengan tingkat kesiapan yang dimiliki.

Berdasarkan pada Keputusan Kemendikbudristek (2022) tentang mekanisme implementasi kurikulum merdeka di satuan dapat mengimplementasikannya melalui 3 (tiga) pilihan sebagai berikut:

- a. Menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka, tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan, misalnya menerapkan projek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai kokurikuler atau ekstrakurikuler dengan konsekuensi menambah jam pelajaran, menerapkan pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik atau pembelajaran terdiferensiasi
- b. Menerapkan Kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh Pemerintah Pusat
- c. Menerapkan Kurikulum Merdeka dengan pengembangan berbagai perangkat ajar oleh satuan pendidikan.

Satuan pendidikan melakukan pendaftaran dan menyatakan opsi implementasi Kurikulum Merdeka yang dipilih. Satuan pendidikan yang memilih pilihan sebagaimana huruf "b" atau huruf "c" ditetapkan sebagai pelaksana Kurikulum Merdeka oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kementerian Agama. Pemerintah melakukan penyesuaian Dapodik pada satuan pendidikan yang sudah ditetapkan sebagai pelaksana Kurikulum Merdeka.

Secara keseluruhan, "Kurikulum Merdeka" adalah kurikulum baru yang memprioritaskan pembelajaran mandiri dan fleksibel. Tujuannya adalah untuk membantu pemulihan pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 dan memberikan lebih banyak kebebasan bagi guru dan siswa dalam belajar (Lidiawati, 2023).

Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2022, terdapat beberapa tahapan aspek yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka:

1. Perancangan kurikulum operasional satuan Pendidikan
2. Perancangan alur tujuan pembelajaran
3. Perencanaan pembelajaran dan asesmen
4. Penggunaan dan pengembangan perangkat ajar
5. Perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila
6. Implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila
7. Penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik
8. Keterpaduan penilaian dalam pembelajaran
9. Pembelajaran sesuai tahap belajar peserta didik (pendidikan dasar dan menengah)
10. Kolaborasi antar guru untuk keperluan kurikulum dan pembelajaran
11. Kolaborasi dengan orang tua/keluarga dalam pembelajaran
12. Kolaborasi dengan masyarakat/komunitas/industri
13. Refleksi, evaluasi, dan peningkatan kualitas implementasi kurikulum

Tahapan implementasi kurikulum tidaklah ditetapkan sebagai peraturan atau standar yang kaku oleh Pemerintah. Sebaliknya, tahapan ini dirancang sebagai panduan bagi pendidik dan satuan pendidikan dalam menetapkan target implementasi Kurikulum Merdeka. Karena kesiapan pendidik dan satuan pendidikan dapat bervariasi, tahapan implementasi ini dirancang agar setiap pendidik dapat mencoba mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dengan percaya diri sesuai dengan tingkat kesiapan mereka, dan secara bertahap meningkatkan keahlian dan kemahiran dalam penggunaannya.

Menurut Kemendikbudristek (2022) kebijakan "merdeka belajar" atau "kebebasan belajar" merupakan inovasi penting dalam sistem pendidikan yang membawa perubahan signifikan. Konsep ini tidak hanya tentang transfer ilmu, tetapi juga tentang transfer nilai-nilai yang mendasari pembelajaran. Kebijakan ini memberikan kebebasan kepada peserta didik dan guru untuk mengembangkan potensi mereka secara lebih mandiri dan kreatif. Namun, penting untuk diakui bahwa implementasi kurikulum yang baru ini tidak selalu berjalan lancar di semua satuan pendidikan. Setiap satuan pendidikan memiliki tingkat kesiapan yang berbeda dalam mengadaptasi perubahan ini.

Meskipun demikian, pemerintah terus berupaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut melalui langkah-langkah seperti Program Guru Penggerak (PGP) yang diluncurkan pada tahun 2022. Langkah-langkah seperti PGP menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus mendorong dan memfasilitasi implementasi kurikulum baru ini. Meskipun masih ada tantangan dalam mengimplementasikan perubahan ini secara menyeluruh di berbagai jenjang pendidikan, upaya pemerintah membuktikan bahwa mereka bertekad untuk meraih kemajuan yang lebih besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Menurut Ramasukun, M.A., Faizin, M., Apia, G., (2024) perangkat pembelajaran pada kurikulum merdeka belajar lebih disederhanakan, karena kurikulum merdeka belajar lebih menitik beratkan pada siswa untuk kemandirian. Dalam Kurikulum Merdeka, perangkat pembelajaran disederhanakan untuk mencerminkan fokus yang lebih besar pada kemandirian siswa. Hal ini berarti bahwa pendekatan pembelajaran lebih menekankan pada kemampuan siswa untuk belajar secara mandiri, memimpin diri sendiri dalam proses pembelajaran, dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di dunia yang kompleks. Dengan menyederhanakan perangkat pembelajaran, Kurikulum Merdeka memberikan lebih banyak ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi minat dan potensi mereka sendiri. Ini menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan memungkinkan siswa untuk mengambil alih peran aktif dalam proses pembelajaran mereka. Dengan demikian, Kurikulum merdeka tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mempersiapkan siswa untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang mandiri dan berdaya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang bertujuan mengeksplorasi dan mendeskripsikan fenomena yang diamati secara komprehensif. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Gunung Picung 07, Kabupaten Bogor, yang dipilih karena perannya sebagai motor penggerak pendidikan di wilayah tersebut. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan teknik pengambilan sampel secara purposive dan snowball. Analisis data dilakukan secara induktif, dimana data yang diperoleh dari lapangan dikategorikan, dijabarkan, dan disintesis untuk membangun hipotesis. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi, perpanjangan keikutsertaan, dan member check. Pendekatan ini menekankan pada makna daripada generalisasi, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam keseluruhan proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Manajerial Kepala Sekolah dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di SDN Gunung Picung 07 Pamijahan Bogor

Menurut Pangastuti (2024), manajerial mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi. Di SDN Gunung Picung 07, peran manajerial kepala sekolah mencakup beberapa aspek penting antara lain:

1. Perencana Kurikulum dan Pembelajaran
Kepala sekolah bertanggung jawab mengembangkan Kurikulum Operasional Sekolah (KOS) sesuai karakteristik sekolah. Proses ini melibatkan pemangku kepentingan dan memastikan guru menerapkan Kurikulum Merdeka dengan baik. Pelaksanaan KOS dan rapat rutin dengan orang tua membantu memastikan tema dan materi pembelajaran sesuai kebutuhan.
2. Peningkatan Kualitas Guru
Kepala sekolah memberikan pelatihan dan supervisi untuk meningkatkan kompetensi guru, termasuk pembuatan modul ajar dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran.

Pelatihan rutin dilakukan melalui pertemuan bulanan dan bimbingan dari Kementerian Pendidikan.

3. **Monitoring dan Evaluasi**

Kepala sekolah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas kurikulum. Evaluasi meliputi administrasi, pembelajaran, dan penilaian siswa, dengan laporan rutin kepada staf ahli Kemendikbud.

Peran Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di SDN Gunung Picung 07 Pamijahan Bogor

Dalam partisipasi diupayakan mendorong masyarakat untuk menampilkan dan merasakan hak-hak dasarnya dalam dunia pendidikan serta berani menyuarakan dan memperjuangkan setiap keputusan dan kebijakan yang diambil guna kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan disekolah (Kariadi, H, 2020). Proses peran serta tersebut akan menjadi efektif karena hasilnya dapat secara langsung dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat berperan besar dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka di SDN Gunung Picung 07 yaitu dengan:

a. **Keterlibatan Orang Tua dan Komite Sekolah**

Orang tua dan komite sekolah memberikan dukungan finansial, moral, dan partisipasi dalam rapat. Ini menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memperkuat karakter siswa.

b. **Kegiatan Sosial dan Budaya**

Kegiatan ini memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat, mendukung pembentukan karakter siswa melalui kegiatan lokal dan budaya, seperti penyelenggaraan bazar makanan tradisional dan kegiatan ekstrakurikuler seperti kesenian sunda dari masyarakat sekitar sekolah.

c. **Gerakan Teman Asuh (GERTA)**

Inisiatif ini membantu siswa kurang mampu dengan dukungan finansial dari teman-teman sekelas. Partisipasi aktif orang tua dan masyarakat, seperti dukungan dalam program sekolah dan kegiatan gotong royong, mendukung implementasi Kurikulum Merdeka dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Peran Manajerial Kepala Sekolah dan Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di SDN Gunung Picung 07 Pamijahan Bogor

Implementasi Kurikulum Merdeka di SDN Gunung Picung 07 memerlukan sinergi antara peran manajerial kepala sekolah dan partisipasi masyarakat. Kepala sekolah harus mampu mengembangkan kurikulum, memberikan bimbingan, serta melakukan evaluasi dan monitoring. Partisipasi aktif masyarakat, termasuk orang tua dan komite sekolah, sangat penting untuk mendukung program dan kegiatan sekolah. Walaupun menghadapi tantangan seperti kondisi ekonomi dan lokasi sekolah, dukungan dari masyarakat dan strategi inovatif kepala sekolah membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan karakter siswa. Kolaborasi antara sekolah, masyarakat, dan aparat desa memastikan keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka dan membawa perubahan positif dalam sistem pendidikan.

KESIMPULAN

Berikut adalah simpulan dan saran yang dapat diambil dari penelitian tentang Peran Manajerial Kepala Sekolah dan Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di SDN Gunung Picung 07 Pamijahan Bogor:

1. Peran Manajerial Kepala Sekolah

Kepala sekolah memiliki dampak positif dalam implementasi Kurikulum Merdeka dengan berperan sebagai perencana kurikulum, peningkatan kualitas guru, dan administrasi pembelajaran yang teratur.

- a. Kepala sekolah berfokus pada pembuatan Kurikulum Operasional Sekolah (KOS) yang sesuai dengan kebutuhan sekolah
- b. Meningkatkan kualitas guru melalui bimbingan dan pelatihan rutin.
- c. Proses monitoring dan evaluasi dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan administrasi pembelajaran dan penilaian guru dilakukan dengan baik.

2. Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan orang tua dan Komite Sekolah dalam berbagai program sekolah menunjukkan partisipasi aktif. Kolaborasi antara sekolah dan masyarakat tercermin dalam kegiatan sosial dan budaya, serta Gerakan Teman Asuh (GERTA) yang membantu siswa kurang mampu.

3. Implementasi Kurikulum Merdeka sukses jika didukung oleh peran manajerial kepala sekolah yang kuat, partisipasi masyarakat yang aktif, dukungan berbagai pihak, dan inovasi dalam metode pengajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). Metode penelitian kualitatif. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Alim, W. S., Manullang, S.O., Aziz, F., Romadhon, S., Marganingsih, A., Mansur, Ratnaningtyas, E.M., Sulandjari, K., Hanifah, Wulandari, R., Effendi, Y. (2022). Pemberdayaan masyarakat: Konsep dan strategi. Samarinda: PT. Gaptex Media Pustaka.
- Anjani, N. F., dan Febriana, D. (2021). Peran manajerial kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar. *Jurnal Mimbar PGSD Undiksha*, 9(3).
- Azis, R. (2018). Implementasi pengembangan kurikulum. *Jurnal UIN Alauddin Makassar*. 7(1), 44-50.
- Baharuddin. (2018). Manajemen partisipatif dalam pendidikan (Perbandingan Indonesia dengan Jepang). Parang: Leisyah.
- Dikbud Banggai. (2023). Paradigma baru kurikulum merdeka menghadapi abad 21. Diunduh pada 14 Mei 2024 dari <https://dikbudbanggai.id/read/183/>
- Emor, A.C., Lonto, A.L, dan Pangalila. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Di Kelurahan Pinasungkulan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung. *Jurnal Civic Education*. 3(1), 45.
- Isa, M., Asrori, dan Rini, M. (2022). Peran kepala sekolah dalam implementasi kurikulum merdeka di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(6).

- Kariadi, H. (2020). Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di SDIT Tahfizul Qur'an An-Nahal Mataram. (Tesis). Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram.
- Kemendikbudristek. (2022). Tahapan Implementasi Kurikulum Merdeka di Satuan Tingkat Pendidikan. Diunduh pada 14 April 2024. <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2022/07/Tahapan-Implementasi-Kurikulum-Merdeka.pdf>.
- Kemendikbudristek. (2023). Hampir 70 Persen Satuan Pendidikan Sudah Menerapkan Kurikulum Merdeka. Diakses pada 24 Januari 2024 dari www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/08/hampir-70-persen-satuan-pendidikan-sudah-menerapkan-kurikulum-merdeka
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 162/U/2003, tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Diunduh tanggal 23 Mei 2024 dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/163908/permendikbud-no-28-tahun-2010>.
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia 262/M/2022, tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran. Diunduh tanggal 14 Juni 2024 dari www.jdih.kemdikbud.go.id.
- Lidiawati. (2023). Kurikulum merdeka belajar: Analisis, implementasi, pengelolaan, dan evaluasi. Jawa Tengah: CV. Eureka Media Aksara.
- Mariana, D. (2021). Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap efektivitas sekolah penggerak dalam meningkatkan kualitas pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 10228-10233.
- Pangastuti, D. (2024). Analisis Peran Kepala Sekolah Sebagai Manajer Di BA Aisyiyah Nangkod Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. (Skripsi). Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Jurusan Pendidikan Madrasah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6 tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Ramasukun, M.A., Faizin, M., dan Apia, G. (2024). Peran Kepala Sekolah dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di SD Negeri 02 Waisai. *Jurnal Papeda*. Vol.6/1. Hal : 13-22.
- Rosmalah, Asriadi, & Mujahidah. (2023). Analisis manajemen kepemimpinan kepala sekolah dalam menerapkan kurikulum merdeka. *Seminar Nasional Hasil Penelitian 2023. "Penguatan Riset, Inovasi, Kreativitas Peneliti di Era 5.0" LP2M-Universitas Negeri Makassar*, 465-472.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tawai, A., & Yusuf, M. (2017). *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan*. Kendari: Literacy Institute.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.